ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SEMARANG

(Studi Kasus di Universitas Dian Nuswantoro Semarang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh

Putri Permatasari
NIM. 6411412120

JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Semarang
Maret 2016

ABSTRAK

Putri Permatasari

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Universitas Dian Nuswantoro Semarang)

VI + 143 halaman + 4 tabel + 4 gambar + 11 lampiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang (di Udinus). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan informan secara *purposive sampling*. Informan berjumlah 11 orang yang terdiri dari mahasiswa dan pegawai Udinus dan informan triangulasi yang berjumlah 3 orang yang terkait dengan pelaksanaan perda. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan grup diskusi dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan ini belum berjalan secara maksimal. Dari enam (6) hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, terdapat tiga hal yang belum berjalan secara maksimal sehingga menghambat pelaksanaan implementasi perda ini. Tiga hal tersebut adalah sumber daya kebijakan yang belum sepenuhnya terpenuhi, komunikasi yang kurang lancar antar organisasi, dan badan pelaksana kebijakan yang masih belum bersikap tegas. Saran bagi instansi terkait, memperbaiki komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan implementasi perda ini dan segera menerapkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok (seperti pembuatan SK Kawasan Tanpa Rokok).

Kata Kunci : Implementasi kebijakan; Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013; Kawasan Tanpa Rokok

Kepustakaan : 32

Public Health Science Department
Faculty of Sport Science
Semarang State University
March 2016

ABSTRACT

Putri Permatasari
Analysis of Implementation Regulation of Semarang City Number 3 Year 2013 Concerning the Area without Cigarettes in Semarang (Case Study at the University Of Dian Nuswantoro Semarang)
VI + 143 pages + 4 tables + 4 images + 11 attachments

This research aimed to investigate implementation of Local Regulation of Semarang No.3 Year 2013 about the regions without cigarette in Udinus Semarang. This research used qualitative research method with informant sampling technique by purposive sampling. Total of the informants were 11 (eleven) most of academic community and 3 (three) person related to the implementation of local regulation. The data retrieval technique used in-depth interview and focus group discussion with descriptive analysis. The result of the research showed that the implementation of this policy implementation was not running optimally. From six (6) things that affect the implementation of policy implementation, there were three (3) things that had not run optimally thus inhibiting the effective implementation of this regulation. Those three (3) things were resource policies that have not been fully met, substandard communication among the organizations, and agency of policy that was still not being assertive. Suggestions for relevant agencies, to improve communication between the organization's implementation of this regulation and to immediately implement a strong commitment to the implementation of the regions without cigarette.

Keywords: Implementation of Policy; the Local Regulation of Semarang District No. 3 Year 2013; Regions without cigarette

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bibliography : 32

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan panitia sidang ujian skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, skripsi atas nama Putri Permatasari, NIM : 6411412120, dengan judul "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang (Studi Kasus di Udinus)".

Pada hari : Selasa

Tanggal : 10 Mei 2016

Panitia Ujian

Ketua Panitia,

Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd
NIP. 196103201984032001

Sekretaris,

Mardiana, S.KM, M.Si
NIP. 198004202005012003

	Dewan Penguji	Tanggal Persetujuan
Ketua Penguji	1. Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si NIP. 196012171986011001	22/5
Anggota Penguji	2. Irwan Budiono, S.KM, M.Kes (Epid) NIP. 197512172005011003	24/5
Anggota Penguji	3. dr. Fitri Indrawati, M.P.H NIP. 198307112008012008	30/5

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini, benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, bagi sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Maret 2016

Peneliti,

Putri Permatasari

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- *Sesungguhnya bersama kesulitan ada pula kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mu lah engkau berharap (QS. Al-Insyirah : 6-8).*
- *There is a will, there is a way.*
- *The only way to do great work is to love what you do.*

PERSEMBAHAN:

Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda (Nurul Huda)
2. Ibunda (Ngatiyem)
3. Teman-temanku di IKM UNNES
4. Almamaterku, Unnes

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan ridho-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang (Studi Kasus di Universitas Dian Nuswantoro Semarang)" dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Ibu Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd., atas ijin penelitian yang telah diberikan.
2. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Ibu Dr. Setya Rahayu, M.S., atas ijin penelitian.
3. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Bapak Irwan Budiono, S.KM, M.Kes (Epid)., atas persetujuan penelitian yang diberikan.
4. Dosen Pembimbing Ibu dr. Fitri Indrawati, M.P.H., atas bimbingan, arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat atas bekal ilmu pengetahuan yang diberikan selama di bangku kuliah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

6. Staf TU Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat (Bapak Sungatno) dan seluruh staf TU FIK Unnes yang telah membantu dalam segala urusan administrasi dan surat perijinan penelitian.
7. Rektor kampus Udinus Semarang atas ijin yang diberikan untuk melaksanakan penelitian.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, atas ijin yang diberikan untuk melaksanakan penelitian.
9. Ayah (Nurul Huda) dan Ibu (Ngatiyem) serta keluarga tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2012 atas bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.

Semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritikan yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Maret 2016

(Penulis)

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Manfaat Penelitian 10

1.5 Keaslian Penelitian 12

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 15

BAB II LANDASAN TEORI 16

2.1 Landasan Teori 16

2.1.1 Kebijakan 16

2.1.2 Analisis Kebijakan 20

2.1.3 Implementasi Kebijakan 24

2.1.4 Proses Komunikasi Kebijakan 31

2.1.5 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 32

2.1.6 Faktor Pendukung Implementasi 38

2.1.7 Faktor Penghambat Implementasi..... 40

2.1.8 Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013..... 41

2.2 Kerangka Teori..... 45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 46

3.1 Alur Pikir..... 46

3.2 Fokus Penelitian 47

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 47

3.4 Sumber Informasi..... 48

3.5 Instrumen dan Teknik Pengambilan Data 49

3.5.1 Teknik Pengambilan Data 49

3.5.1.1 Observasi..... 50

3.5.1.2 Wawancara..... 50

3.5.1.3 Fokus Grup Diskusi 50

3.5.1.4 Studi Dokumentasi..... 51

3.5.2 Instrumen Penelitian..... 52

3.6 Prosedur Penelitian..... 52

3.6.1 Tahap Pra Penelitian 52

3.6.2 Tahap Penelitian..... 53

3.6.3 Tahap Pasca Penelitian 53

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data 53

3.8 Teknik Analisis Data 54

3.8.1 Reduksi Data 55

3.8.2 Penyajian Data 55

3.8.3 *Conclusion drawing / verification* 55

BAB IV HASIL PENELITIAN 56

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 56

4.1.1 Sejarah Singkat 56

4.2 Hasil Penelitian 58

4.2.1 Gambaran Umum Informan Penelitian 58

4.2.1.1 Gambaran Umum Informan Utama 58

4.2.1.2 Gambaran Umum Informan Triangulasi 60

4.2.2 Gambaran Implementasi Perda Kota Semarang No 3 Th 2013 61

4.2.2.1 Standar dan Tujuan Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan 61

4.2.2.1.1 Pemahaman 61

4.2.2.1.2 Tujuan 63

4.2.2.2 Sumber Daya 65

4.2.2.2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia 65

4.2.2.2.2 Tempat Penyediaan Merokok 66

4.2.2.2.3 Tanda Pengumuman Larangan Kawasan Tanpa Rokok 68

4.2.2.3 Komunikasi Antar Organisasi 69

4.2.2.3.1 Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok 69

4.2.2.3.2 Dukungan Kepada Fakultas 71

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4.2.2.4 Lingkungan 72

4.2.2.4.1 Pengaruh Lingkungan Sosial 72

4.2.2.4.2 Pengaruh Lingkungan Ekonomi 74

4.2.2.4.3 Pengaruh Lingkungan Politik 75

4.2.2.5 Karakteristik Badan Pelaksana..... 76

4.2.2.5.1 Hubungan Udinus dengan Pemerintah Daerah 77

4.2.2.5.2 Kebijakan yang Tumpah Tindih 78

4.2.2.6 Disposisi Implementor 79

4.2.2.6.1 Respon..... 79

BAB V PEMBAHASAN 83

5.1 Pembahasan 83

5.1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan..... 83

5.1.2 Sumber Daya..... 86

5.1.3 Komunikasi Antar Organisasi 93

5.1.4 Lingkungan 96

5.1.5 Karakteristik Badan Pelaksana 97

5.1.6 Sikap Pelaksana 98

5.2 Hambatan Penelitian 100

5.2.1 Hambatan Penelitian 100

5.2.2 Kelemahan Penelitian 101

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 102

6.1 SIMPULAN 102

6.2 SARAN 103

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN 110

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 1.1 Penelitian-Penelitian yang Relevan Dengan Penelitian Ini..... 12

Tabel 2.1 Tahap-tahap Dalam Proses Pembuatan Kebijakan 20

Tabel 4.1 Gambaran Umum Informan Utama 59

Tabel 4.2 Gambaran Umum Informan Triangulasi..... 60

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar 2.1 Tiga elemen Sistem Kebijakan..... 18

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 26

Gambar 3.1 Alur Pikir 46

Gambar 3.2 Komponen Dalam Analisis Data 55

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

Lampiran 1 . SK Pembimbing..... 111

Lampiran 2. Surat Ijin Pengambilan Data Awal 112

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian 113

Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian 114

Lampiran 5. Ethical Clearance 115

Lampiran 6. Surat Ijin Badan Kesbangpol 116

Lampiran 7. Prosedur fokus grup diskusi 118

Lampiran 8. Rekapitulasi Data Informan..... 132

Lampiran 9. Transkrip wawancara dan diskusi..... 137

Lampiran 10.Dokumentasi 142

Lampiran 11. Gambar SK KTR 146

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang tidak sehat yang mana setiap kali menghirup asap rokok, baik sengaja ataupun tidak sengaja dapat diartikan juga menghisap lebih dari 4000 macam racun yang terkandung dalam rokok. Hak untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok sudah menjadi perhatian dunia. WHO memprediksikan mengenai penyakit yang berhubungan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan di dunia. Dari 10 orang dewasa terdapat 1 orang yang meninggal dunia yang disebabkan oleh rokok atau asap rokok. Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India (Yuliati, 2014 : 2).

Di Indonesia Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit kematian utama di Indonesia yaitu 59, 5% pada tahun 2007. Prevalensi PTM telah meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir yang disebabkan oleh penuaan umur penduduk dan globalisasi risiko khususnya penggunaan tembakau (TCSC-IAKMI, 2013: 3). Penyalahgunaan tembakau merupakan penyebab kematian yang dapat dihindari, namun tetap saja banyak orang yang sulit lepas dari rokok. Pada tahun 2010, diperkirakan 384.058 orang yakni sekitar 237.167 laki-laki dan 146.881 wanita di Indonesia menderita penyakit terkait konsumsi tembakau. Total kematian akibat konsumsi rokok mencapai 190.260 yang meliputi 100.680 laki-laki dan 146.881 wanita atau sekitar 12,7% dari total kematian tahun 2010 (TCSC-IAKMI, 2013 : 4).

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun 2014, epidemi tembakau telah membunuh sekitar 6 juta orang per tahun, 600 ribu orang di antaranya merupakan perokok pasif. Temuan ini diperkuat dengan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 yang menunjukkan perokok usia di atas 15 tahun sebanyak 36,3 persen. Sebagian besar dari mereka ialah perokok laki-laki dengan prevalensi 64,9 persen dan jumlah ini merupakan yang terbesar di dunia. Sementara itu, prevalensi pada perempuan mengalami peningkatan dari 5,2 persen pada tahun 2007 menjadi 6,9 persen pada tahun 2013. Sekitar 6,3 juta wanita Indonesia usia 15 tahun ke atas juga merokok. Perilaku merokok penduduk 15 tahun keatas masih belum terjadi penurunan dari 2007 ke 2013, cenderung meningkat dari 34,2 persen tahun 2007 menjadi 36,3 persen tahun 2013. Proporsi penduduk umur ≥15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau cenderung meningkat dalam Riskesdas (34,2%), Riskesdas 2010 (34,7%) dan Riskesdas 2013 (36,3%). Dengan mengutip data The Global Youth Survey Tahun 2006, Menkes menambahkan, 6 dari 10 pelajar (64,2%) yang disurvei terpapar asap rokok. Lebih dari sepertiga (37,3%) merokok, bahkan 3 diantara 10 pelajar atau 30,9% pertama kali merokok pada umur dibawah 10 tahun. Selanjutnya di provinsi Jawa Tengah proporsi penduduk usia lebih dari 10 tahun yang tiap hari merokok adalah 22,9% (Riskesdas, 2013: 6).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kota Semarang memiliki angka kematian penyakit tidak menular yang disebabkan oleh tembakau mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2010 sebesar 907 kasus, tahun 2011 naik menjadi 1077 kasus, tahun 2012 sebeesar 2084 kasus, dan pada tahun 2013 sebesar 2725 kasus (Laporan P2P Dinkes Kota Semarang, 2014: 51).

Undang-Undang Kesehatan RI No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa produk tembakau adalah zat adiktif yang peredaran dan konsumsinya harus dikendalikan. Dalam pasal 115 Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, angkutan umum harus ditetapkan kebijakan mengenai perlindungan seseorang terhadap perokok pasif. (Kemenkes, 2011: 18).

Perokok pasif menghisap lebih banyak zat berbahaya dibandingkan perokok aktif, perokok aktif hanya menghisap sekitar 25% dari asap rokok yang berasal dari ujung yang terbakar. Sementara 75% lainnya diberikan kepada non perokok ditambah separuh asap yang dihembuskan perokok. Beberapa racun yang paling mematikan dalam rokok antara lain, tar yang mengiritasi pada paru-paru dan menyebabkan kanker. Kemudian, karbonmonoksida yaitu gas beracun yang menghalangi masuknya oksigen ke dalam tubuh. Asap rokok membunuh 1 non-perokok dari setiap 8 orang yang meninggal akibat merokok (IAKMI-*Tobacco Control Support Center*, 2008).

Pemerintah memiliki fungsi pembuat kebijakan khususnya dalam rangka mengendalikan suatu kegiatan yang menyangkut dan berdampak luas pada masyarakat. Menyadari pentingnya perlindungan terhadap bahaya rokok maka perlu disusun suatu bentuk kebijakan yang bentuk dan substansinya memiliki daya laku efektif. Pengendalian kegiatan merokok tidak akan efektif tanpa disertai dengan adanya norma yang akan membebani berupa sanksi atas perilaku yang dipandang menyimpang. (Kemenkes, 2011).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif dan perokok pasif merupakan salah satu solusi untuk menghirup udara yang bersih tanpa paparan asap rokok atau hal ini yang disebut Penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebenarnya selama ini telah diupayakan oleh berbagai pihak baik lembaga/insitusi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Namun pada kenyataannya upaya yang telah dilakukan tersebut jauh tertinggal dibandingkan penjualan, periklanan/ promosi, dan atau penggunaan rokok. Asumsi yang lain adalah dari perokok yang membebankan biaya keuangan dan risiko fisik kepada orang lain yang berarti bahwa seharusnya perokoklah yang menanggung semua "biaya" atau kerugian akibat merokok. Tetapi pada kenyataannya perokok membebankan secara fisik dan ekonomi kepada orang lain juga. Beban ini meliputi risiko orang lain yang terkena asap rokok di lingkungan sekitarnya dan biaya yang dibebankan pada masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Agar permasalahan dan kondisi tersebut di atas dapat dikendalikan maka perlu dilakukan upaya pengamanan terhadap bahaya merokok melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan juga membatasi ruang gerak para perokok (Kemenkes, 2011: 8)

Upaya pemerintah untuk melindungi orang yang tidak merokok (perokok pasif) yang sesuai dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) yang mana dalam Undang-Undang tersebut membahas tentang rokok dan kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok pada pasal 115 (UU Kesehatan Tahun 2009).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kawasan Tanpa Rokok atau biasanya yang disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kawasan tanpa rokok, pemanfaatan kawasan tanpa rokok dan pengendalian pemanfaatan kawasan tanpa rokok. Pemerintah menetapkan kawasan tanpa rokok menjadi 7 tempat diantaranya adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum (Kemenkes, 2011: 15).

Kota Semarang juga memiliki kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok, yakni Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian untuk memperkuat peraturan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 29A Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Untuk memperkuat peraturan ini pemerintah membuat serangkaian peraturan yang didukung oleh Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang tentang penetapan kawasan tanpa rokok di kota semarang. Dengan ditetapkan SK Kota Semarang ini telah ditetapkannya kawasan tanpa rokok yang pada Bab Kedua ayat 2 yang meliputi Tempat Pembelajaran. Yang mana tempat pembelajaran pada kawasan tanpa rokok salah satunya pendidikan tinggi yang meliputi semua Perguruan tinggi di Kota Semarang (Lembaran daerah Kota Semarang, 2013: 3).

Mahasiswa adalah kaum intelektual yang merupakan bagian dari masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa berperan sebagai kontrol sosial dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

menjadi golongan masyarakat yang memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Dalam penelitian analisis Implementasi kebijakan merupakan analisis pelaksanaan pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Grindle (1980) dalam Akib mengatakan bahwa implementasi adalah proses tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995) dan Wibawa, dkk (1994) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah atau swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah standar dan tujuan, sumberdaya kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi (lingkungan) dan disposisi implementor (sikap pelaksana) (Akib, Haedar, 2010 : 2).

Menurut penelitian Michael,Lane, dan Nataliya (2014) mengungkapkan dalam survei penelitiannya menjelaskan mengenai manfaat adanya kebijakan kawasan tanpa rokok dilingkungan kampus yang mana hasil dari penelitian tersebut terdapat sekitar 10% mahasiswa yang merokok pada umumnya menunjukkan kurang berpartisipasi terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok (Michael, Lane, dan Nataliya, 2014 : 24-25).

Kebijakan publik yang telah dilaksanakan tentang kawasan bebas asap rokok dalam kenyataannya masih sulit untuk di aplikasikan. Lingkungan berpengaruh

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

terhadap suatu kebijakan yang dilaksanakan. Jika dalam suatu tempat lingkungannya tidak mendukung maka perlu di bentuk suatu tempat khusus untuk para perokok (William et al, 2013: 2)

Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Kriswiharsi (2012) dengan desain rancangan penelitian cross sectional ditemukan bahwa 83,3% responden berpengetahuan baik, 93,8% responden mempunyai sikap baik, 83,3% partisipasi responden tergolong kurang tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada penelitian Kriswihari mengungkapkan bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai partisipasi mahasiswa dalam bentuk penelitian kualitatif yang lebih mendalam untuk menggali opini perokok untuk secara bersama-sama mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di kampus, mengingat mayoritas perokok dijumpai pada usia muda. (Kriswihari, 2012).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 Mei 2015 di kampus Udinus Semarang menunjukkan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Dian nuswontoro sudah di wujudkan dengan peraturan larangan merokok di area KTR, pemasangan *banner* Kawasan bebas rokok di gedung yang dinyatakan bebas asap rokok, tidak adanya promosi dan sponsor rokok dalam kegiatan kampus sehingga diharapkan dapat berkontribusi mewujudkan masyarakat yang sehat tanpa asap rokok. Namun pada kenyataannya implementasi KTR belum optimal yang mana di kampus masih ditemukan perokok aktif yakni sekitar 32,9% pada tahun 2015 yang mana pada presentase tersebut masih ditemukan mahasiwa ataupun pegawai yang melanggar peraturan kawasan tanpa rokok di sekitar lingkungan kampus. Selanjutnya adanya kebijakan kawasan tanpa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

rokok ini sudah ditegakkan, kemudian saat di lapangan peneliti memperoleh informasi bahwa mahasiswa yang merokok diberikan sanksi yakni berupa teguran.

Permasalahan yang lain yaitu dukungan dari masyarakat yang ada dilingkup dalam kampus seperti mahasiswa dan pejabat kampus yang masih kurang terhadap kawasan tanpa rokok baik didalam gedung ataupun luar gedung. Menurut salah satu dosen yang ikut membuat kebijakan Kawasan Tanpa rokok di kampus Udinus mengatakan bahwa kampus Udinus merupakan kampus yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Jateng untuk melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Semarang pada tahun 2010 dan peraturan kawasan tanpa rokok di Universitas Dian Nuswantoro sudah diterapkan, kemudian juga sudah ada Surat Keputusan (SK) mengenai Kawasan tanpa rokok di kampus namun peraturan kawasan tanpa rokok tersebut masih dilanggar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tempat yang harusnya bebas asap rokok, namun masih banyak dijumpai para perokok. Pada penelitian ini peneliti ingin menggali informasi mendalam mengenai opini mahasiswa dan pegawai dalam implementasi perda nomor 3 tahun 2013 mengenai kawasan tanpa rokok di Semarang. Kendala yang dapat menghambat implementasi sebuah kebijakan ini seharusnya ditemukan dan dikoreksi oleh penetap, pelaksana dan pengawas sebuah kebijakan. Hal ini dapat berfungsi sebagai penyusun strategi baru agar kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan sesuai keinginan yakni terciptanya kawasan tanpa rokok atau bebas asap rokok di lingkungan kampus.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG)".

1.2 Rumusan Masalah

Kampus Udinus merupakan kampus yang sudah menerapkan klinik berhenti merokok dan kampus bebas asap rokok yang ditunjukkan adanya pemasangan banner tanda larangan merokok disekitar kampus. Jumlah perokok aktif di kampus adalah sebanyak 32,9%. Di Kampus Udinus sudah menerapkan sanksi kepada seseorang yang melanggar peraturan mengenai kawasan tanpa rokok. Namun dalam kenyataanya masih ditemukan perokok yang berada di lingkungan kampus. Berdasarkan masalah tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang (di Kampus Udinus)?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang (di Kampus Udinus).

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui pengetahuan mahasiswa dan pegawai di kampus Udinus Semarang tentang peraturan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Semarang Nomor 3 Tahun 2013.

2. Mengetahui penerapan standar dan tujuan Peraturan Daerah Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kampus Udinus Semarang.
3. Mengetahui peran sumber daya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kampus Udinus Semarang.
4. Mengetahui keefektifan komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Semarang Nomor 3 Tahun 2013.
5. Mengetahui pengaruh lingkungan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Semarang Nomor 3 Tahun 2013.
6. Mengetahui dukungan dari badan pelaksana dan sikap pelaksana dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Semarang Nomor 3 Tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Bagi Kampus Udinus

Bagi warga yang berada di kampus Udinus Semarang agar dapat mematuhi adanya kawasan tanpa rokok yang berada di lingkungan kampus.

1.4.2 Bagi Dinas Terkait

Sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan penyusunan rencana baru untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang khususnya dan kebijakan-kebijakan lain umumnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.4.3 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat

Sebagai bahan tambahan kepustakaan dan bahan tambahan informasi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.4 Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan peneliti mengenai implementasi sebuah kebijakan serta mampu menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat pada implementasi Peraturan Daerah Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang, khususnya di kampus Udinus.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Penelitian-Penelitian yang Relevan Dengan Penelitian Ini

No (1)	Judul Penelitian (2)	Nama Peneliti (3)	Tahun dan Tempat Penelitian	Rancangan Penelitian (5)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Faktor Kepatuhan Mahasiswa dan Karyawan Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro	Amalia Puswitasari	2012 Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro Kota Semarang	Cross sectional	Variabel bebas : 1. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok 2. Pengetahuan tentang bahaya kandungan rokok 3. Sanksi pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok 4. Faktor-faktor perilaku merokok Variabel terikat : Kepatuhan terhadap kawasan tanpa rokok	*Pertama :* Latar belakang perilaku merokok berpengaruh terhadap kepatuhan mahasiswa dan karyawan terhadap Kawasan Tanpa Rokok. *Kedua :* Pengetahuan mengenai bahaya kandungan rokok tidak berpengaruh terhadap kepatuhan mahasiswa dan karyawan terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok *Ketiga :*

						Pengetahuan mengenai peraturan kawasan tanpa rokok berpengaruh terhadap kepatuhan mahasiswa dan karyawan terhadap peraturan kawasan tanpa rokok.
2.	Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadi-yah Surakarta	Purwo Setiyo Nugroho	2015 Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhamma-diyah Surakarta	Penelitian Kualitatif, Pendekatan fenomenologi	1. Sikap 2. Faktor pendukung 3. Faktor penghambat	Implementasi kawasan tanpa rokok FIK, belum maksimal dengan indikator ketercapaian KTR di lingkungan Muhammadiyah terdapat beberapa faktor penghambat penerapan KTR FIK UMS, yakni: - Kurangnya sosialisasi melalui media lain mengenai kawasan tanpa rokok di FIK UMS

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

		seperti banner, pamflet serta poster. - Kurang maksimalnya media edukasi kesehatan melalui media promosi kesehatan mengenai bahaya merokok di lingkungan FIK UMS. - Belum adanya Juru Anti Rokok yang membuat rencana strategi pengembangan kawasan tanpa rokok FIK UMS. - Fungsi klinik berhenti merokok yang kurang maksimal. Terdapat faktor pendukung implementasi kawasan tanpa rokok FIK UMS, yakni: Terdapat klinik berhenti merokok yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

		menjadi salah satu fasilitas pendukung dalam menunjang keberhasilan kawasan tanpa rokok FIK UMS.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Amalia Puswitasari adalah tempat penelitian, fokus penelitian, dan rancangan penelitian. Pada penelitian Amalia Puswitasari, penelitian dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kemudian untuk fokus penelitian pada penelitian Amalia Puswitasari adalah Faktor Kepatuhan Mahasiswa dan Karyawan Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Untuk rancangan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik dengan desain penelitian berupa cross sectional. Selanjutnya pada penelitian Purwo Setiyo Nugroho yang membedakan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian. Jika pada peneliti Purwo Setiyo Nugroho di Fakultas Ilmu Kesehatan UMS dan pada penelitian ini dilaksanakan di Kampus Udinus Semarang. Selanjutnya penelitian Purwo Setiyo Nugroho berfokus pada tingkat evaluasi implementasi kawasan tanpa rokok di FIK UMS, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok di kampus UDINUS Semarang.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi tempat, waktu dan ilmu.

1.6.1 Ruang lingkup tempat

Penelitian ini dilakukan di Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

1.6.2 Ruang lingkup waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016.

1.6.3 Ruang lingkup ilmu

Materi dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kebijakan

Dye dalam Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*whatever government choose to do or not to do"* yang dalam bahasa Indonesia berarti apapun juga yang dipilih pemerintah, baik mengerjakan sesuatu ataupun tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu, sedangkan Robert Eyestone mengatakan secara luas bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Winarno, 2007:17).

Kemudian menurut Budi Winarno juga mengasumsikan bahwa kebijakan merupakan suatu kegiatan beserta konsekuensinya yang banyak berhubungan dengan mereka yang bersangkutan untuk mencapai suatu keputusan tersendiri. (Winarno, 2012: 20)

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat dilakukan sendiri ataupun melalui instansi yang lain (baik instansi milik pemrintah ataupun milik swasta), yang mana tujuan dan maksudnya adalah untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat atau dapat dikatakan sebuah kebijakan merupakan pedoman dan pengatur yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan tak lepas juga kaitannya dengan kehidupan nasional yang kondisinya dapat berubah dari waktu ke waktu, ada saatnya jika konflik dapat di redam dengan upaya kesatuan bentuk dalam bentuk segala aspek kehidupan

nasional, dan ada saatnya pula dimana konflik perlu dikembangkan dalam kehidupan nasional untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan. Pada kebijakan pemerintah dalam konteks mikro, dalam proses kebijakan hanya ada tiga komponen yang saling berinteraksi, antara lain : (1) Kebijakan itu sendiri, (2) pelaku kebijakan, dan (3) lingkungan (Faried Alilam, Sastro M. Wantu, 2012 : 88).

Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaanya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi, hal ini sejalan dengan pendapat *Easton* bahwa kebijakan mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan (Islamy, 2001: 19).

Namun demikian tidaklah mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar, namun bukannya tidak mungkin suatu kebijakan publik akan dapat mengatasi permasalahan yang ada, untuk itu harus memperhatikan berbagai faktor, sebagaimana dikatakan Amara Raksasataya dalam Islamy (2001:17) mengemukakan bahwa suatu kebijakan harus memuat elemen-elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami isu atau masalah publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan taktik dan startegi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk perundang-undangan, setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik di implementasikan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat.

Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan disebut *stakeholder*. Kemudian yang dimaksudkan mengenai lingkungan mencakup keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, regional, dan internasional. Pada hakekatnya kebijakan publik berada dalam suatu sistem, dimana kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik antara ketiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan, sebagaimana yang digambarkan Dunn 1999 (Subarsono, 2005: 15) dalam pola sebagai berikut:

Gambar 2.1. Tiga elemen sistem kebijakan (Sumber: Pengantar AnalisisKebijakan Publik Edisi Kedua, Dunn, William N (Subarsono, 2005: 15).

Terlihat bahwa skema diatas menunjukkan 3 sub sistem yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam kesatuan sistem tindakan. Terlihat sub sistem *stakeholder* atau para pelaku kebijakan berinteraksi dengan lingkungan kebijakan dan dengan

kebijakan publik yang diperlakukan. Interaksi berlangsung secara timbal balik dalam pengertian *stakeholder* mempengaruhi lingkungan dan juga sebaliknya lingkungan akan mempengaruhi para pelaku kebijakan. Tampak bahwa kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh pemerintah dan diformulasikan ke dalam berbagai masalah (isu) yang timbul, keterlibatan pelaku kebijakan yaitu para individu atau kelompok individu akan mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan, dalam aplikasinya pelaksanaan secara strategi dituangkan dalam program kegiatan, lain halnya pendapat Korten dalam (Subarsono, 2005: 60) yang berpendapat bahwa keberhasilan suatu program akan ditentukan oleh tiga aspek yaitu jenis program, *beneficiaries* (penerima program) dan organisasi pelaksana program, meskipun hampir sama namun pandangan Korten lebih sempit dibanding pendapat Dunn.

Interaksi sub sistem lainnya adalah interaksi para pelaku kebijakan dengan kebijakan itu sendiri. Pelaku kebijakan adalah manusia yang beragam otoritasnya, sedangkan kebijakan publik adalah kehendak otoritas yang termasuk dalam komitmen yang terumus yang akan dilaksanakan. Sub sistem lain yang interaksinya terjadi secara timbal balik merupakan subsistem lingkungan kebijakan dan kebijakan itu sendiri. Sebaliknya, isi kebijakan akan menentukan reaksi atau aksi yang terjadi oleh lingkungan, apakah reaksi yang ditimbulkan oleh komitmen akan memperlihatkan warna dari lingkungan dimana kebijakan itu di perlakukan dan mungkin saja pada saat kebijakan dirumuskan (Subarsono, 2005: 61).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.1.2 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan sebagai rangkaian tahap yang saling ketergantungan. Analisa kebijakan bekerja dalam sebuah lingkungan yang serba terbatas: waktu, informasi, bahkan pengetahuan. Analisa kebijakan juga merupakan profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pemimpin puncak di berbagai lembaga administrasi publik, pada setiap jenjang untuk menganalisis kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu atau beberapa atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada jenis atau tipe masalah yang akan dihadapi (Winarno, 2007: 33)

Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan mengenai tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan.

Tabel 2.1. Tahap-Tahap Dalam Proses Pembuatan Kebijakan

No.	Fase	Karakteristik
1.	Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
2.	Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.

		Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
3.	Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
4.	Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia.
5.	Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, da peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Sumber: Dunn, William N., 1999 (Winarno, 2007: 33).

Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuat kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan

aktivitas yang berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap selanjutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap ditengah, dalam lingkaran aktifitas yang tidak linear. Aplikasi prosedur dapat menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap, yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pada tahap-tahap berikutnya. Aktivitas yang termasuk dalam aplikasi prosedur analisis kebijakan adalah tepat untuk tahap-tahap tertentu pada proses pembuatan kebijakan. Ada sebagian cara untuk penerapan analisis kebijakan yang dapat memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing tahapan dalam kebijakan:

1. Perumusan Masalah → Penyusunan agenda

Perumusan masalaah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda *(agenda setting).* Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan serta merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

2. Peramalan → formulasi kebijakan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap

formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, selanjutnya adalah mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politiik atau dukungan dan oposisi dari berbagai pilihan.

3. Rekomendasi → adopsi kebijakan

Rekomendasi menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalaui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Pemantauan → implementasi kebijakan

Pemantauan atau biasa disebut dengan monitoring menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak instansi yang secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas, dan ilmu teknologi. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan serta rintangan dalam implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5. Evaluasi

Evaluasi menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengenai ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan hasil outputnya. Pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi disini tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, namun juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan serta membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada masyarakat. Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno, 2007: 145).

Implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan masalah perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan (Akib, 2010: 6).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Solichin (Wahab, 2008: 164), dimana keduanya membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok peme-rintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

1. Standar dan tujuan

Di mana standar dan tujuan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.

2. Sumber daya kebijakan

Dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia

3. Hubungan antar organisasi (Komunikasi)

Komunikasi yaitu dalam benyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Karakteristik agen pelaksana (Badan Pelaksana) Mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi (Lingkungan)

   Variable ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini masyarakat yang ada di lingkungan, serta para elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor (Sikap Pelaksana)

   Mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

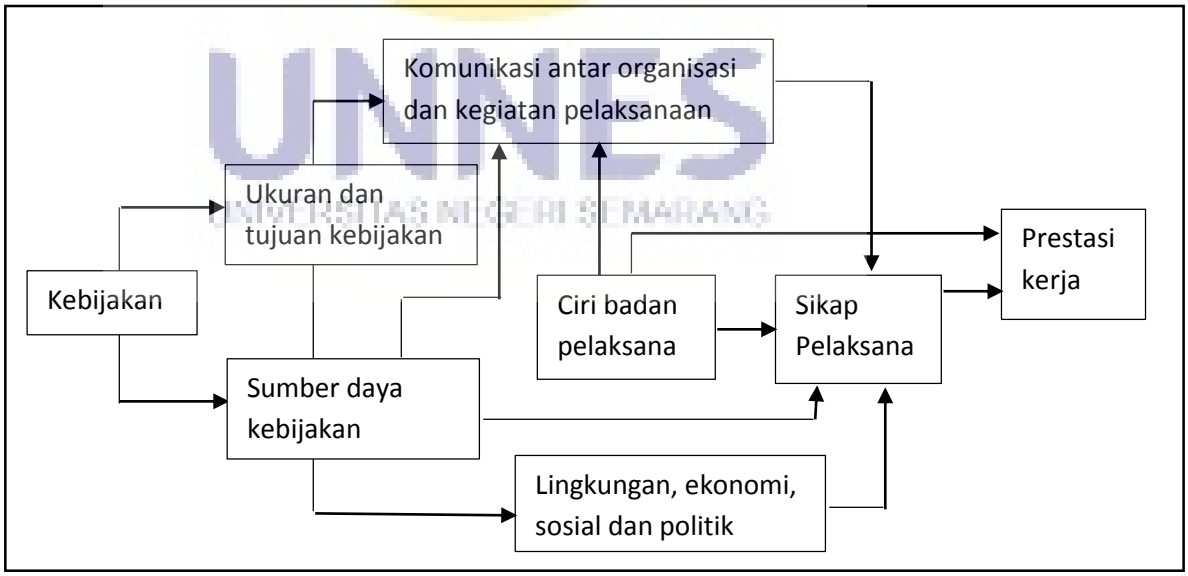

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007: 157).

Dalam prosedur analisis kebijakan pada tipe pembuat kebijakan, implementasi kebijakan masuk dalam kegiatan pemantauan atau monitoring. Pemantauan (monitoring) yang menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengenai akibat mengenai akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Hal ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Pemantauan (monitoring) membantu menilai tingkat kepatuhan serta menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan serta tantangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan

Dalam mendesain kebijakan para pengambil keputusan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi permasalahan kebijakan, yaitu kebutuhan, nilai atau kesempatan yang diinginkan oleh publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Contohnya permasalahan tingginya tingkat pengangguran, tidak adanya lahan pekerjaan, kerusuhan, kemiskinan dan lain-lain.
2. Latar belakang kepentingan para perumus kebijakan yaitu apa saja yang melatarbelakangi para aktor dalam merumuskan kebijakan, contohnya : hubungan relasi, kepentingan politik tertentu, situasi politik, waktu dan tempat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Konteks kebiajakan, yaitu apa yang mendasari penetapan desain kebijakan. Contohnya : memecahkan masalah kebijakan, mendukung kepentingan politik tertentu dan kepatuhan.
4. Komitmen yaitu komitmen akan adanya dukungan politik dan dukungan sumber daya finansial atas kebijakan yang ditetapkan.
5. Sasaran kebijakan yaitu apa dan siapa yang akan menjadi target dari kebijakan yang akan ditetapkan.

Implementor kebijakan agar dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik dipengaruhi oleh hal-hal berikut :

1. Kepemimpinan. Organisasi implementor harus memiliki pimpinan yang dapat mengarahkan seluruh aktivitas organisasi untuk mencapai hasil yang telah diprediksi oleh perumus kebijakan. Kepemimpinan memiliki peran untuk menentukan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar mampu menterjemahkan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan.
2. Komitmen. Upaya upaya yang dilakukan oleh implementor harus didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh komponen organisasi mulai dari pimpinan sampai dengan staff, karena tanpa adanya komitmen, konsekuensi-konsekuensi yang telah diprediksi akan sulit untuk dapat dicapai.
3. Perencanaan. Setiap kebijakan atau program yang telah ditetapkan oleh para perumus kebijakan harus direncanakan dengan baik oleh implementor sebelum diimplementasikan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu menterjemahkan tujuan kebijakan atau program ke aktivitas-

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

aktivitas yang terarah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.

4. Dukungan finansial. Setiap kebijakan akan memiliki konsekuensi finansial, oleh karena itu implementasi kebijakan membutuhkan dukungan finansial yang mampu menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan tersebut.
5. Dukungan staff yang profesional. Pihak yang secara langsung menjadi implementor di lapangan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan adalah staff, oleh karena itu agar implementasi dapat berjalan dengan baik dibutuhkan adanya dukungan staff yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
6. Koordinasi. Implementor kebijakan bukanlah pihak yang berdiri sendiri tetapi merupakan pihak-pihak yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu agar implementasi kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya perlu adanya koordinasi diantara pihak-pihak tersebut.
7. Sinkronisasi. Untuk menghindarkan persepsi yang berbeda diantara implementor, perlu adanya sinkronisasi mengenai teknis implementasi kebijakan tersebut.
8. Sistem dan prosedur. Kejelasan dan keteraturan langkah penerapan kebijakan memerlukan adanya sistem dan prosedur yang baku yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pihak yang mengimplementasikan kebijakan tersebut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

9. Ketepatan waktu. Proses implementasi merupakan tahapan yang sequential yang saling berkaitang sehingga jika salah satu tahapan implementasi tidak dilaksanakan tepat waktu maka tahapan-tahapan berikutnya juga akan berpengaruh oleh keterlambatan tersebut.
10. Bebas pengaruh intervensi dalam proses implementasi akan berakibat pada ketidak konsistenan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan yang pada akhirnya tujuan utama dari kebijakan tidak terpenuhi. Oleh karena itu implementor harus bebas pengaruh pada saat pelaksanaan implementasi kebijakan apabila kebijakan tersebut telah dapat ditetapkan dengan baik.

Hal penting lainnya agar kebijakan dapat dipersepsikan dan diimplementasikan dengan baik oleh implementor, adalah adanya interaksi antara pihak yang merumuskan kebijakan membutuhkan data dan informasi yang akurat yang akan digunakan untuk mendesain kebijakan, akan tetapi mereka tidak memiliki infrastruktur yang baik untuk mendapatkan data dan informasi tersebut. Ketersediaan data dan informasi akan dapat dipenuhi dengan baik oleh implementor karna mereka memiliki infrastruktur yang memadai untuk dapat mencari data, mengolahnya dan menjadikannya informasi yang berguna bagi para perumus kebijakan. Di pihak lain, menterjemahkan suatu kebijakan menjadi program-program dan aktivitas-aktivitas yang spesifik oleh implementor tidak akan efektif jika tidak melakukan interaksi berupa komunikasi dengan para perumus kebijakan.

2.1.4 Proses Komunikasi Kebijakan

Analisis kebijakan adalah awal bukan akhir dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Itulah sebabnya analisis kebijakan didefinisikan sebagai pengkomunikasian, atau penciptaan dan penilaian kritis. Komunikasi Kebijakan bukan hanya proses pemberitahuan hasil kebijakan semata kepada stakeholder. Analisis kebijakan dibuat atas dasar permintaan informasi dan nasihat dari pelaku kebijakan. Dalam rangka menanggapi permintaan tersebut, analis kebijakan menciptakan dan secara kritis menilai pengetahuan yang relevan dengan masalah kebijakan (Subarsono, 2005: 29).

Pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses yang meliputi analisis kebijakan, pembuat materi, komunikasi intraktif dan pemanfaatan pengetahuan. Analisis kebijakan dibuat atas dasar permintaan informasi dan nasihat dari pelaku kebijakan pada setiap tahap dari proses pembuatan kebijakan. Dalam rangka menanggapi permintaan tersebut, analisis kebijakan mendeskripsikan secara kritis menilai pengetahuan yang relevan pada masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, analis menciptakan berbagai dokumen yang relevan dengan masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan. Untuk mengkomunikasikan pengetahuan tersebut, analis menciptakan berbagai dokumen yang relevan dengan kebijakan yang meliputi nota kebijakan, paper isu kebijakan, ringkasan eksekutif, lampiran dan siaran berita. Pada kesempatannya dokumen-dokumen tersebut Akan berguna sebagai bahan untuk strategi komunikasi interaktif dalam percakapan,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

konferensi, pertemuan, *briefing*, dengan pendapat resmi, dan bentuk presentasi lisan lainnya. Tujuan dari penciptaan dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan dan presentasi lisan ini adalah untuk meningkatkan prospek pemanfaatan pengetahuan dan diskusi terbuka antara para pelaku kebijakan pada beberapa tahap proses pembuatan kebijakan. Komunikasi dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan adalah sentral dalam praktik dan teori analisis kebijakan.

2.1.5 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Van Meter dan Van Horn adalah (Winarno, 2007 : 155) :

1. Standar dan Sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Namun dibeberapa

kasus kita menemukan beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja.

Menurut Van Meter dan Van Horn ada dua penyebab yang menyebabkan hal itu terjadi, yang pertama disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuannya yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-Sumber Kebijakan (Sumber daya)

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapat perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan *financial* dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik *financial* maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai efisien.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketetapan

komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi di dalam dan antar organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Komunikasi ini menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dirancangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus diterapkan sebagai acuan, misalnya seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.

Jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Oleh karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketetapan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi diinternal birokrasi. Menurut Van Meter dan Van Horn pembahasan terkait karakteristik badan pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-

karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan yakni kompetensi dan ukuran staf suatu badan, tingkat pengawasan hinerarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana, sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif), vitalitas suatu organisasi, tingkat komunikasi-komunikasi "terbuku", yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisonta dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi, dan kaitan forma dan informal suatu badan dengan badan "pembuatan keputusan" atau "pelaksana keputusan".

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menunjuk bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial da politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Van Meter dan Van Horn mengusulkan agar kita memberi pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam organisasi pelaksana cukup menduung implementasi yang berhasil ?
2. Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
3. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan ?
4. Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan ?
5. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan ?
6. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?

6. Sikap pelaksana

Menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Van Meter dan Van Horn mengidentifikasikan tiga unsur tanggapan pelaksana dalam mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni : kognisi (pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. Dalam keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan.

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan denga tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Begitu juga sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil. Menurut Van Meter dan Van Horn, ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni : tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetian-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih di senangi. Intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.1.6 Faktor Pendukung Implementasi

Pengertian implementasi kebijakan merupakan sebuah alat administrasi hukum dimana terdapat berbagai aktor, organisai, prosedur serta teknik yang bekerjasama untuk menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang di inginkan (Winarno, 2012: 102).

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gun dalam buku Wahab, 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan yang dapat terjadi mungkin sifatnya fisik, politis, dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan pada suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan di tempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi koordinasi yang sempurna.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

    (Hogwood dan Lewis dalam Wahab, 2008: 71-78)

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan oleh pemerintah saja. Akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya. Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

1. Kepedulian anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat olehpara pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan.
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi.
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan di kenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Wahyu, 2008:218).

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarrakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.1.7 Faktor Penghambat Implementasi

Menurut Imam Hanfi dkk kebijakan publik, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat (Imam Hanafi dkk, 2008: 733), yaitu:

1. Isu kebijakan / Masalah Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana, dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

2.1.8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 ini mengulas penuh mengenai kawasan tanpa rokok yang terdapat di Kota Semarang. Peraturan daerah ini terdiri dari 13 Bab dan 35 pasal. Peraturan ini dibuat dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yakni untuk upaya melindungi perokok pasif dari perokok aktif dan pengendalian perokok aktif.

Bab I terdiri atas 1 pasal yang berisi tentang ketentuan umum dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Di dalam Bab I ini dijelaskan daerah yang

dimaksud adalah Kota Semarang (poin 1). Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (poin 2). Kemudian Walikota adalah Walikota Semarang poin (3). Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi (poin 4). Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (poin 5), kawasan tanpa rokok, serta badan.

Bab II terdiri atas 3 pasal yang berkaitan dengan obyek dan subyek pada peraturan ini. Obyek penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan kepentingan tujuan kualitas kesehatan masnusia, kelestarian dan keberlanjutan ekologi, perlindungan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, keadilan (pasal 2). Subyek pada penetapan kawasan tanpa rokok ini bertujuan untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung ataupun tidak langsung. Kemudian melarang / menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok di kawasan tanpa rokok (pasal 3). Serta ruang lingkup pengaturan kawasan tanpa rokok meliputi hak dan kewajiban, penetapan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok, pembinaan dan pelaporan, dan peran serta masyarakat (pasal 4).

Bab III terdiri dari 2 pasal yang membahas mengenai hak atas informasi mengenai kawasan tanpa rokok, peran aktif pengendalian pemanfaatan kawasan

tanpa rokok (pasal 5). Dan setiap orang dan atau badan wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok (pasal 6).

Bab IV terdiri dari 1 pasal yang menyatakan bahwa tempat-tempat yang dinyatakan sebagai kawassan tanpa rokok yang meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umumnya lainnya.

Bab V mencakup 3 pasal yakni menyatakan mengenai penyelenggaraan kawasan tanpa rokok yang meliputi pengumuman dan tanda-tanda larangan yang menyatakkan tempat-tempat yang sudah ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Bab VI tentang pengendalian penyelenggaraaan kawasan tanpa rokok yang terdiri dari 11 pasal. Bab VII mengenai pembinaan dan pelaporan terdiri 4 pasal. Bab VIII membahas mengenai peran serta masyarakat terdiri dari 2 pasal. Dan Bab IX membahas mengenai sanksi administrasi yang dijelaskan terdiri dari 4 pasal. Menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan merokok di tempat yang ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok akan dienakan sanksi berupa teguran untuk mematuhi larangan. Dalam hal administratif maka akan diancam kurungan paling lambat 3 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Bab XII ketentuan peralihan dan XIII membahas mengenai ketentuan penutup yang mana peraturan daerah ini mulai berlau pada tanggal yang sudah di undangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Semarang (Lembar Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peraturan Daerah Kota Semarang ini di tetapkan di Kota Semarang pada tanggal 30 Meni 2013 oleh Walikota Semarang saat itu yaitu Hendrar Prihadi serta di undangkan di Kota Semarang pada tanggal 30 Mei 2013 oleh Sekertaris daerah Kota Semarang pada saat itu yaitu Adi Tri Hananto. Peraturan Daerah ini terdapat pada lembaran daerah Kota semarang Tahun 2013 Nomor 3. Membaca peraturan tersebu berarti semua lapisan masyarakat harus memenuhi atau ikut berpartisipasi menyelenggarakan implementasi mengenai kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2 Kerangka Teori

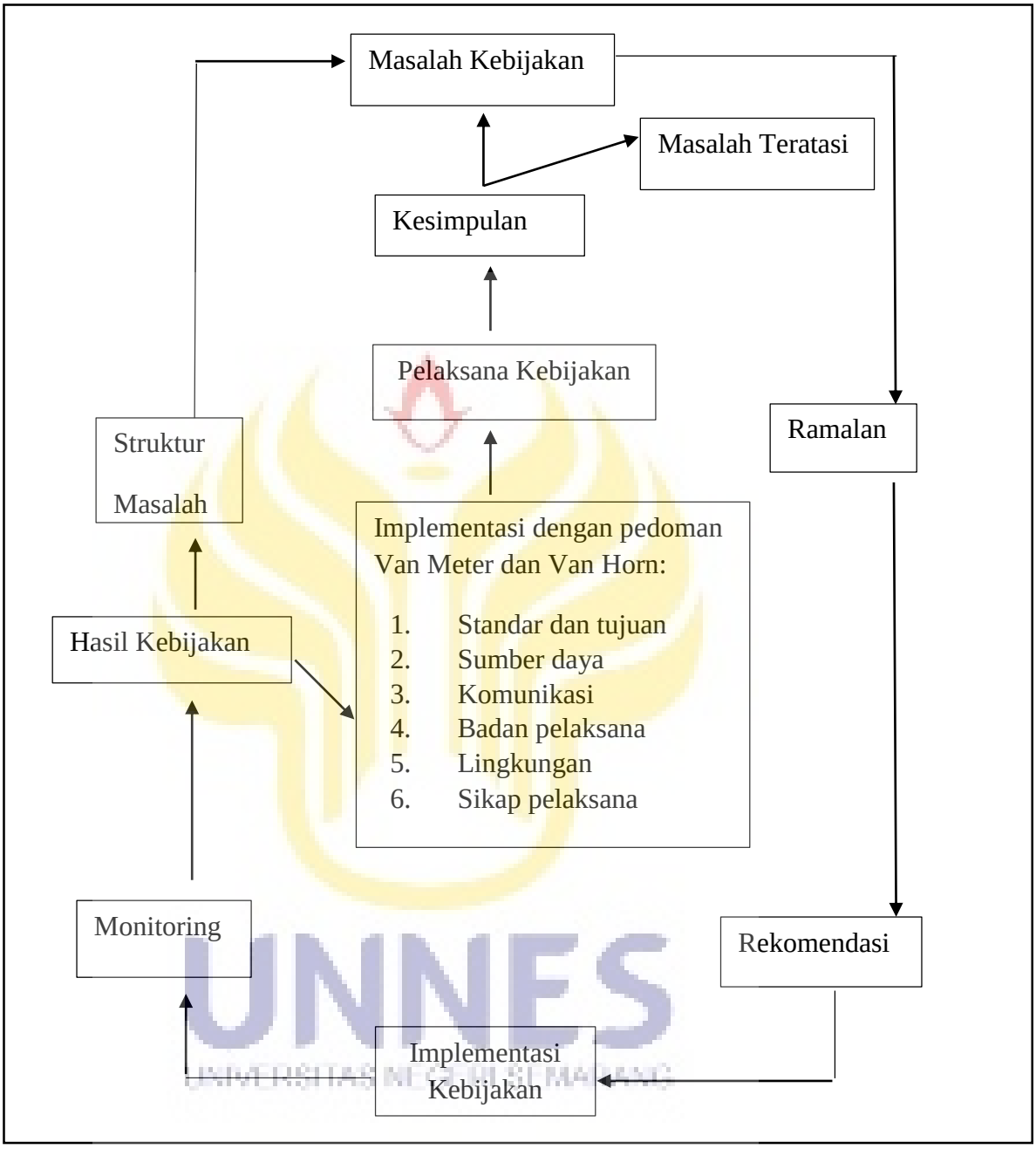

Gambar 2.3 Kerangka Teori (Sumber Modifikasi Dunn 1999 (Subarsono, 2005: 9), Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008: 164), (Winarno, 2007: 144)

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Universitas Dian Nuswantoro Semarang), menerangkan bahwa implementasi kebijakan Perda No.3 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok belum berjalan secara maksimal. Hal ini dilihat dari komitmen yang belum cukup tinggi dari pemangku kebijakan di Udinus terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Secara spesifik dapat disimpulkan bahwa :

1. Standar dan tujuan kebijakan masih sangat beragam terkait pemahaman KTR (Kawasan Tanpa Rokok) pada civitas akademik Udinus.
2. Sumber daya implementasi kebijakan KTR dari sumber daya manusia yang ada di Udinus sebenarnya sangat mendukung Kawasan Tanpa Rokok di kampus, selanjutnya dari segi dana belum ada anggaran khusus untuk penerapan perda, kemudian sarana dan prasarana yang ada di Udinus masih kurang, karena adanya tanda larangan merokok di kampus masih sangat sedikit, kemudian dalam penerapan kebijakan ini di kampus Udinus belum ada satgas dan *smoking area* yang berfungsi untuk menerapkan KTR secara penuh.

3. Komunikasi antar organisasi pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Semarang masih sangat minim dalam hal mensosialisasikan KTR kepada pimpinan di Udinus. Sehingga pimpinan yang ada di kampus Udinus hanya mensosialisasikan secara tidak formal baru sebatas rapat kegiatan bersama pimpinan-pimpinan fakultas.
4. Lingkungan kebijakan ini belum sepenuhnya mendukung perda ini. Lingkungan tersebut dilihat dari lingkungan sosial yang mana Udinus belum secara kondusif dalam implementasi Kawasan tanpa rokok dibuktikan masih banyaknya perokok di lingkungan kampus. Selanjutnya lingkungan ekonomi juga masih belum maksimal karena kampus masih bergantung pada industri rokok seperti adanya beasiswa.
5. Karakteristik badan pelaksana yang ada di Udinus masih belum bersikap tegas terkait pelanggaran yang terjadi di kawasan tanpa rokok.
6. Semua civitas akademik Udinus sudah memiliki respon yang sangat baik terkait kawasan tanpa rokok.

6.2 SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan perda adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang dan jajaran yang terkait

a. Melakukan advokasi mengenai pentingnya penerapan kawasan tanpa rokok di perguruan tinggi untuk mengurangi resiko penyakit akibat merokok dan sebagai bentuk pengendalian dampak tembakau.
b. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi berkala.
c. Melakukan upaya peningkatan mutu secara berkala bagi pengawas internal yang ada di perguruan tinggi

2. Bagi Universitas Dian Nuswantoro Semarang
   a. Komitmen dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi di Udinus perlu ditingkatkan dalam bentuk mengeluarkan SK Rektor mengenai kawasan tanpa rokok.
   b. Sosialisasi perda harus dilakukan kepada semua civitas akademika agar tercipta kerjasama untuk mensukseskan penerapan perda di Udinus oleh pengambil kebijakan di Udinus.
   c. Perlu menyiapkan alokasi dana khusus untuk menyukseskan penerapan perda di Udinus.
   d. Memperbanyak media promosi seperti baliho, spanduk, stiker, serta atribut-atribut lain mengenai kawasan tanpa rokok.
   e. Bertahap mengurangi penerimaan bantuan dari industri rokok.
   f. Pihak kampus memberikan ruang khusus untuk para perokok yang nyaman agar perokok aktif tidak merokok ditempat yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Bagi Pemerintah

a. Pemerintah dan Kementrian Pendidikan Tinggi bekerja sama dalam pengawasan intervensi industri rokok pada tempat pendidikan.

b. Pemerintah menghimbau kepada Kementrian Pendidikan Tinggi untuk mengeluarkan kebijakan kampus kawasan tanpa rokok.

c. Antar sektor yang ada di pemerintah saling bekerjasama dalam pengawasan intervensi rokok pada tempat pendidikan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

_____, 2005, *Metode Penelitian Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus.* CAPS, Yogyakarta .

____.2008.*Paket Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*.IAKMI, Tobacco Control Support Center *Rokok*.Jakarta.

Akib, H. (2010). *Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 hal. 1-11.

Amalia, Puswitasari, 2012, *Faktor Kepatuhan Mahasiswa dan Karyawan Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas Kedokteran Undip. Jurnal KTI,* Semarang : FK KEDOKTERAN UNDIP.

Badan Penelitian dan Pengembangan, 2013, *Riset Dasar Kesehatan Tahun 2013*, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Faried Alilam, Sastro M. Wantu, 2012, *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori, dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah.*, Refika Aditama,Bandung

Fransia W, 2010, *Implementasi Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dukungan Organisasi Terhadap Peningkatan Kualitas Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon*, Jurnal Manajemen Vol.12 No2 hal.206.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Heru, R, dkk, 2007, *Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Studi pada Kantor Pariwisata, seni dan Budaya Kab Lumajang*, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, Volume 1 Nomer 1 hal.166.

Imam Hanafi, dkk, 2008, *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun di Kota Malang*, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, Vol.2 No.4 hal.733

Irwanto, 2006, *Focused Group Discussion (FGD) : Sebuah Pengantar Praktis*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Islamy, M. I. (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. http://digilib.unila.ac.id/327/9/BAB%20II.pdf diakses tanggal 5 Oktober 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 21 Mei 2015, (www.google,com/kamusbesarbahasaindonesia)

Kementrian Kesehatan, 2011, *Pusat Promosi Kesehatan. Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, Jakarta

Kriswiharsi, KS, 2013,*Tingkap Partisipasi Mahasiswa dalam Implementasi Kawasan Tanpa rokok*, Semarang, Jurnal visikes Vol.12, No 2 hal 172.

Mekar, S, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Michael, Lane, Nataliya, 2014, *Perceived Benefits of a Designated Smoking Area Policy on a College Campus: Views of Smokers and Non-smokers*, New York : *Journal International of Student Affairs* volume 14 isue 1 page 19-28.

Moleong, Lexy MA, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Notoatmojo, S. (2005), *Metode Penelitian Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Perda Kota Semarang. No 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok , 2013. Semarang. Lembaran daerah

Purwo SN, 2015, *Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Faultas Ilmu Kesehatan UMS*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Purwo, SN, 2015, *Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, UMS, Surakarta.

Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiyono, P. D, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Vol. 8), Alfabeta cv, Bandung.

TCSC-IAKMI, 2013, Atlas Tembakau Indonesia Edisi 2013, ISBN, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Wahab, Abdul Solichin, 2008, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, PT Bumi Aksara Jakarta.

Wahyu, Nurharjadmo, 2008, *Evaluation Implementation Dual System Education Program in Senior Technical High School*, Jurnal Administrasi negara, UNS, Surakarta Vol.4 Nomer.2, hal 218.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Malang : Cetakan Ketiga Banyumedia.

William, et al, 2013, *Environmental Tobacco Smoke Concentrations in No-Smoking and Smoking Section of Restaurants,* American Journal of Public Health volume 83 No9 hal.1339.

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses,* MedPress, Yogyakarta

Yuliati, S, 2014, *Politik Australia Dalam Framework Convention On Tobacco Control (FCTC) 2010-2013,* (Online) Vol. 1 No.2, hal 1-5, di akses 10 November 2015, (*http://*jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/2743/2674*)*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG